

ISLAMIC LAW

KIK  
Per 30/01  
Sar  
P

**SKRIPSI**

**DYANA WULAN SARI**

**PENGATURAN HIBAH  
DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

KIK  
Per 29/01  
Kus  
i

**SKRIPSI**

**CHRISTYANI KUSUMANINGTYAS**

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN MASALAH  
WARIS DI PENGADILAN AGAMA  
SURABAYA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2001**

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN MASALAH  
WARIS DI PENGADILAN AGAMA  
SURABAYA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

**Dosen Pembimbing**

**Penyusun**

**Lilieek Kamilah, SH. M.Hum**  
**NIP. 130531799**

**Christyani Kusumaningtyas**  
**NIM. 039714556**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2001**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang panjang lebar yang telah saya uraikan dalam bab I sampai bab III, maka saya berkesimpulan bahwa :

- a. Kedudukan hukum waris islam dalam tata hukum Indonesia untuk saat sekarang ini menurut saya sudah dapat dilakukan dan mengikat. Dimulai dari sejarah terbentuknya Pengadilan Agama pada tahun 1882 dengan stb. 1882 no. 152, yang kemudian pada tahun 1937 oleh pemerintah Hindia Belanda dicabut kembali berdasarkan teori receptie yang sangat merugikan kemajuan hukum islam sendiri, sampai akhirnya tahun 1989 dengan dikeluarkannya UU No. 7 / 1989 yang merupakan titik kulminasi dari pengembalian kompetensi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara waris bagi orang islam. Dengan dikeluarkannya UU No. 7 / 1989, berarti telah mengembalikan kompetensi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara waris pada tahun 1882 yang dicabut oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937 lewat teori receptienya. Hal ini sekaligus melaksanakan apa yang diamanatkan oleh pasal 10

ayat 1 UU No. 14 / 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu. Peradilan agama, militer, dan tata usaha negara merupakan peradilan khusus yang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan. Selain itu pula dengan munculnya SEMA RI No. 2 / 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 7 / 1989 semakin menambah kokohnya Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara waris bagi orang-orang islam. Ini berarti bahwa peraturan mengenai waris (khususnya) yang salah satunya merupakan kompetensi Pengadilan Agama dapat dikatakan sebagai peraturan yang telah mengikat bagi orang-orang islam untuk dilaksanakan.

- b. Berdasarkan praktek di lapangan yaitu melalui pengamatan, pengumpulan data dan wawancara, maka dapat saya simpulkan bahwa perkara waris bagi orang islam sudah bisa dilaksanakan secara efektif. Selain peraturannya sendiri telah dengan tegas mengatakan demikian, aparat-aparat hukum yang terdiri dari para hakim dan pengacara serta masyarakat telah



mengetahui dan sebagian besar telah melaksanakannya sesuai ketentuan. Itu semua dilakukan berdasarkan kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan ajaran agamanya, tidak menutup kemungkinan dilakukan juga untuk menghindari jalur pengadilan yang selama ini terkesan memakan waktu, biaya, dan tenaga terlalu banyak, para ahli warisnya sendiri telah banyak mengerti bahwa dalam hal pembagian harta warisan dapat dimusyawarahkan, pilihan hukum hanya dibenarkan selama hal tersebut dilakukan sebelum berperkara di pengadilan. Jadi mereka lebih suka menentukan sendiri daripada harus ditentukan oleh pengadilan.

## 2. Saran

Beranjak dari pendahuluan, pembahasan sampai kesimpulan, maka saya ingin memberikan beberapa saran yang saya anggap perlu demi tegaknya negara hukum Indonesia ini :

- a. Dengan dikembalikannya kompetensi dalam mengadili perkara waris (khususnya) pada Pengadilan Agama, maka berarti mengurangi satu dari sekian perkara perdata yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri, namun demikian janganlah dianggap sebagai pengambilan kompetensi oleh Pengadilan Agama dari Pengadilan Negeri, sebab hal seperti ini akan memberi kesan yang kurang baik, seakan-akan Pengadilan

Agama telah merebut kompetensi Pengadilan Negeri. Padahal lembaga peradilan itu diciptakan untuk memberikan pengayoman dan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukannya.

- b. Seyogyanya pihak-pihak yang terkait dalam masalah ini diantaranya Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dengan sikap ksatria mau melaksanakan apa yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan dari negara hukum Indonesia.
- c. Meskipun kompetensi dalam mengadili perkara waris orang islam telah kembali pada Pengadilan Agama, tetapi hal ini tidak mengurangi kewibawaan Pengadilan Negeri sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia. Saya berharap bahwa semua ini akan menambah terpacunya semangat kerja di tiap-tiap lembaga peradilan untuk membuktikan asumsi bahwa setiap institusi adalah yang terbaik di tempatnya, sehingga dapat terjalin kerja sama yang baik untuk menciptakan hubungan yang harmonis diantara keempat lingkungan peradilan di Indonesia (pada umumnya) serta Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Indonesia (pada khususnya).